

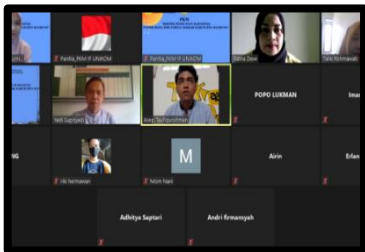
**PENINGKATAN PENGETAHUAN KELEGISLATIFAN KADER MUDA  
DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN BANDUNG**  
*Increasing Knowledge of Young Cadres of DPD Golkar, Bandung  
Regency*

**Tatik Rohmawati**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer  
Indonesia, Bandung, Jawa Barat

\*Penulis Koresponden:  
[tatik.rohmawati@unikom.ac.id](mailto:tatik.rohmawati@unikom.ac.id)

**Sejarah Artikel**  
Diterima  
November 2021  
Revisi  
Desember 2021  
Disetujui  
Januari 2022  
Terbit Online  
Juli 2022



**Abstrak**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk membuka pengetahuan yang lebih luas mengenai kelegislatifan di kalangan para kader, mendapatkan kader-kader muda yang paham, andal dan mengerti tentang kelegislatifan yang berkembang di pemerintahan Indonesia serta menumbuhkan calon-calon pemimpin masa depan yang baik dan benar di lembaga legislative. Metode yang digunakan adalah ceramah melalui webinar dengan memberikan materi tentang Proses Legislatif yang demokratis kepada peserta. Hasil kegiatan PKM ini bagi peserta dapat meningkatkan pengetahuan tentang kelegislatifan, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya lembaga legislatif serta mengembangkan pola pikir dalam hal legislatif demi kemajuan bangsa Indonesia. Bagi Perguruan tinggi dalam hal ini Unikom dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bidang dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kabupaten Bandung, terutama dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu dapat menjalin relasi antar lembaga dan bagi masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya kepada kader muda DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung. Kader Muda DPD Partai Golkar lebih mengetahui dan bertambah ilmu pengetahuan mereka terkait proses legislatif. Hal ini diketahui dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa peserta dan atas jawaban yang diberikan para peserta cukup memuaskan.

**Kata Kunci:**

- DPD Golkar
- kader muda
- kelegislatifan

**Keywords:**

- *DPD Golkar*
- *legislature*
- *young cadre*

**Abstract**

*Community Service activities (PKM) are aimed at opening wider knowledge about legislation among cadres, getting young cadres who are knowledgeable, reliable and understand the legislative developments that are developing in the Indonesian government and to grow future leaders who are good and right in the legislature. The method used is a lecture through a webinar by providing material on the Democratic Legislative Process with participants. The results of this PKM activity for participants can increase knowledge about legislation, raise awareness about the importance of legislative institutions and develop a mindset in legislative matters for the progress of the Indonesian nation. For universities, in this case UNIKOM can collaborate in various fields with the Regional Representative Council (DPD) of Bandung Regency, especially in the Governance Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences. In addition, it can establish relations between institutions and the community can also convey their aspirations to the young cadres of the DPD Golkar Party, Bandung Regency. Young DPD cadres of the Golkar Party know better and increase their knowledge regarding the legislative process. This is known from several questions asked by several participants and the answers given by the participants were quite satisfactory.*

## **1. PENDAHULUAN**

Lembaga legislatif di Indonesia sangat berpengaruh besar dalam berjalannya suatu ketatanegaraan, di mana pembentuk peraturan masyarakat, sistem pemerintahan itu sendiri hingga hukum yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas dan fungsi lembaga legislative, maka kader muda yang merupakan bagian anggota dalam suatu fraksi perlu mendapatkan pengetahuan tentang kelegislatifan dengan baik dan benar. Legislatif memiliki beberapa fungsi yang berada di pemerintahan, seperti:

- 1) Fungsi legislasi merupakan fungsi dari lembaga legislatif untuk membuat suatu undang-undang yang akan digunakan dan diterapkan dalam mengatur segala kegiatan lembaga yang ada, kader muda merupakan perwujudan dari lembaga legislatif sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembuatan undang-undang.
- 2) Fungsi pengawasan merupakan fungsi dari lembaga legislatif yang bertugas mengawasi segala kinerja yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yang dalam tatanan pemerintahan agar segala kinerja yang dilakukan lembaga eksekutif tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Fungsi anggaran merupakan fungsi dari lembaga legislatif yang bertugas untuk membuat dan mengesahkan rancangan anggaran yang diajukan oleh lembaga eksekutif.

Dari ketiga fungsi ini dapat dilihat bahwa lembaga legislatif memiliki peran yang sangat penting di lembaga pemerintahan khususnya bagi kader muda. Dengan memiliki fungsi legislasi maka lembaga legislatif dapat membuat sebuah undang-undang yang akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota dalam lembaga pemerintahan tersebut sehingga dapat membuat sebuah gerakan perubahan yang berguna untuk memperbaiki menjadi lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan seluruh warga masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dengan memiliki fungsi pengawasan maka lembaga legislatif dapat mengawasi kinerja lembaga eksekutif dalam menjalankan segala kinerjanya yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemerintahan. Jika lembaga legislatif ingin agar lembaga eksekutif tidak bertindak di luar dari tugasnya, maka lembaga legislatif dapat mengawasi dan mengontrolnya agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap kegiatan yang ada di pemerintahan. Terakhir, dengan memiliki fungsi anggaran, maka lembaga legislatif dapat melakukan pembagian dana yang diperoleh dengan adil kepada seluruh bidang sesuai dengan porsi masing-masing bidang tersebut.

Oleh karena itu, ketika seorang pemimpin ingin melakukan sebuah gerakan perubahan

tidak harus selalu dari lembaga eksekutif tetapi dapat juga melalui lembaga legislatif dengan menggunakan fungsi-fungsi yang dimilikinya tersebut. Tetapi, kebanyakan masyarakat kurang tertarik untuk terjun ke dalam dunia legislatif karena dianggap lembaga yang tidak memiliki kegunaan dan tidak memiliki andil yang besar dalam kegiatan pemerintahan. Jadi untuk mengatasi permasalahan dalam kader muda untuk mengambil andil dalam kelegislatifan yang ada di pemerintahan maka kami membuat sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait peningkatan pengetahuan kelegislatifan.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa Webinar atau seminar online tentang Bimtek Penguatan Kapasitas Kader Muda DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 30 Juli 2021 Pukul 15.30 sampai 18.00 WIB di Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Peserta dalam kegiatan tersebut berjumlah 17 kader. Kegiatan ini dimulai dari pengumuman dan informasi kegiatan melalui media sosial dan email kepada para anggota kader DPD Partai Golkar di Kabupaten Bandung. Pelaksanaan Webinar ini dilaksanakan dengan gratis (*Free*).



**Gambar 1.** Informasi pengumuman di Media Sosial

Pada saat berjalannya kegiatan, seluruh peserta diminta untuk menggunakan virtual background yang sudah ditentukan oleh Panitia seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini.



**Gambar 2.** *Virtual background* dalam webinar

Para peserta yang mengikuti kegiatan PKM ini dapat dilihat dari pengisian daftar hadir yang dibagikan pada saat kegiatan berlangsung.

**Tabel 1.** Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan PKM

No	Waktu	Nama Lengkap	Usia
1	7/30/2021 15:54:25	Riki Hermawan	31 Tahun
2	7/30/2021 15:59:16	Asep Taufiqurohman	27 Tahun
3	7/30/2021 15:59:16	Yadi Supriyadi	41 Tahun
4	7/30/2021 16:02:22	Asep Nasruddin	40 Tahun
5	7/30/2021 16:02:56	Ratna Dewi, S.Sn, M.Sn	38 Tahun
6	7/30/2021 16:07:46	Adhitya Saptari	28 Tahun
7	7/30/2021 16:09:35	Andri Firmansyah, S.Kom	41 Tahun
8	7/30/2021 16:21:06	Imas Sulastri	53 Tahun
9	7/30/2021 16:21:42	Popo Lukman	45 Tahun
10	7/30/2021 16:26:36	Hasbi	25 Tahun
11	7/30/2021 16:42:18	Agus Sofwan	45 Tahun
12	7/30/2021 16:42:36	Dindin Rohaedin	43 Tahun
13	7/30/2021 16:47:11	Jajang Nurjaman	34 Tahun
14	7/30/2021 16:54:30	Andi Haerudin	46 Tahun
15	7/30/2021 17:26:54	Nani Rochaeni	51 Tahun
16	7/30/2021 17:32:48	Nani Rochaeni	51 Tahun
17		Jajang Nuzaman	

### 3. HASIL DAN DISKUSI

Pada pelaksanaan Bimtek Penguatan Kapasitas Kader Muda DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, Materi yang disampaikan adalah tentang Proses Legislatif Yang Demokratis yang meliputi paparan sebagai berikut :

- 1) Makna Proses Legislatif
- 2) Makna Demokrasi
- 3) Lembaga Yang Berwenang
- 4) Hak, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR
- 5) Anggota DPR Yang Tangguh



**Gambar 3.** Dokumentasi pemberian materi

Penyampaian materi dilaksanakan selama kurang lebih 40 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Terdapat 4 pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Hasil dari diskusi dan tanya jawab, diketahui bahwa para peserta cukup puas dengan jawaban-jawaban yang disampaikan. Pada Tabel 2 terlihat pertanyaan dan jawaban pada saat kegiatan yang disampaikan secara lengkap.

**Tabel 2.** Daftar pertanyaan dan jawaban pada saat kegiatan

No	Peserta	Pertanyaan	Jawaban
1	Ratna Dewi, S.Sn, M.Sn	Bagaimana caranya menyikapi terhadap adanya senioritas?	Faktor senioritas pasti ada dalam setiap lingkungan kita bekerja. Yang terpenting kita bisa mengambil sikap tegas dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
2	Ratna Dewi, S.Sn, M.Sn	Menjadi kader tidaklah mudah. Oleh karena itu apa yang dipersiapkan oleh kader untuk masuk menjadi anggota Legislatif	Hendaknya setiap kader memperhatikan <i>Fit and Proper test</i> (uji kelayakan maupun uji kepantasan) dari anggota Dewan
3	Asep Nasruddin	Bagaimana kewenangan Lembaga Legislatif setelah Pasca Amandemen ?	Secara prinsip ada tiga fungsi pokok, yaitu Legislator, <i>Budgeting</i> dan <i>controlling</i> . Pasca amandemen dalam fungsi legislator ada rancangan undang-undang yang tidak hanya berasal dari anggota Dewan, melainkan berasal dari Presiden juga.
4	Asep Nasruddin	Bagaimana Proses penyampaian Aspirasi dari Masyarakat dapat terjaring dan tersampaikan ke anggota Dewan?	Tugas dari kader sebagai kepanjangan tangan dari wakil rakyat dengan mengadakan penyuluhan secara langsung ke masyarakat sehingga bisa menjaring aspirasi dari masyarakat tersebut.

Hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan PKM yang dilaksanakan secara daring adalah masalah jaringan atau sinyal yang kurang stabil dari para peserta sehingga mengakibatkan peserta keluar masuk zoom. Sinyal yang kurang mendukung tersebut berasal dari beberapa peserta dari daerah yang jauh dari perkotaan. Selain itu tidak sepenuhnya para peserta dan panitia menggunakan *virtual background*, ini juga disebabkan adanya sinyal yang kurang stabil. Adapun hambatan dalam Kader Muda DPD Partai Golkar yaitu adanya faktor senioritas. Senioritas diartikan sebagai masih adanya kesenjangan antara yang muda atau baru dengan yang sudah lama yang berada di DPD. Hal ini terungkap oleh salah satu peserta yang menyampaikan pada saat sesi diskusi atau tanya jawab.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka disarankan kepada para peserta untuk mencari-cari tempat terbaik dimana sinyal dapat, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Mengenai masalah senioritas yang selalu terjadi, maka perlu ketegasan dari seseorang untuk menentukan sikap, tidak terpengaruh, niatkan tujuan melaksanakan tugas dengan baik.



**Gambar 4.** Dokumentasi hasil kegiatan PKM

### **3.1 Kutipan dan Acuan**

Struktur lembaga perwakilan rakyat (legislatif) secara umum terdiri dari dua model, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (unicameral) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (bicameral). Dalam ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislatif direpresentasikan pada tiga lembaga yakni MPR, DPR, dan DPD.

#### **1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

Seiring dengan tuntutan reformasi keberadaan MPR dalam system ketatanegaraan Indonesia banyak melahirkan perdebatan. Satu pihak menghendaki MPR dihilangkan karena fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah cukup dilakukan oleh DPR, sementara di pihak lain tetap menghendaki MPR tidak dibubarkan.

Dari ketiga lembaga legislatif tersebut posisi MPR merupakan lembaga yang bersifat khas Indonesia. Menurut Asshiddiqie (2011), keberadaan MPR terkandung nilai-nilai historis yang cenderung dilihat secara tidak rasional dalam arti jika kedudukannya sebagai suatu lembaga dihilangkan dapat dinilai menghilangkan satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan yang justru dianggap perlu dilestarikan.

Salah satu keberatan pihak yang mempertahankan keberadaan MPR ini berargumentasi bahwa, jika MPR ditiadakan atau hanya sekadar dianggap nama dari parlemen dua kamar (bicameral), maka sila 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan' menjadi berubah. Prinsip permusyawaratan tercermin dalam kelembagaan MPR, sedangkan prinsip perwakilan dianggap tercermin dalam kelembagaan DPR (Ubaedillah, *et al*, 2003).

Dengan demikian maka MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga lainnya. Tugas dari MPR yaitu mengubah dan menetapkan UUD 1945. MPR juga dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden apabila tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

## **2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada 19 Oktober 1999, dalam sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999. Dalam perubahan ini, terjadi pergerakan kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang, yang diatur dalam pasal 5, berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20).

Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislatif nasional yang semula berada di tangan presiden, beralih ke tangan DPR. Rumusan pasal 20 (baru) berbunyi sebagai berikut:

- a) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- b) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- c) Jika rancangan undang-undang itu mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
- d) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- e) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (Ni'matul, 2014).

Jadi, Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang merupakan perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki 3 fungsi yaitu sebagai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Membentuk undang-undang terlebih dahulu dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.



### **3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan DPD dalam rangka restrukturisasi perlemen diindonesia menjadi dua kamar yang diadopsi. Perbedaan DPD dan DPR terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili masing-masing. DPR dimaksudkan untuk mewakili rakyat, sedangkan DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah. Sehingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan melengkapi keberadaan DPR sebagai lembaga legislatif (Asshiddiqie, 2005)

DPD adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum yang memiliki fungsi:

- a) Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
- b) Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

### **4. SIMPULAN**

Simpulan dari kegiatan PKM ini adalah Kader Muda DPD Fraksi Golkar lebih mengetahui dan bertambah ilmu pengetahuan mereka terkait proses legislatif. Ini dibuktikan dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa peserta, dari jawaban yang disampaikan terlihat bahwa cukup memuaskan para peserta.

Adapun Rekomendasi yang dapat diberikan pada kegiatan PKM Bimtek ini adalah sebaiknya pada saat rekrutmen anggota DPD Partai Golkar, DPD Partai Golkar benar-benar memperhatikan *fit and proper test* atau uji kelayakan dan uji kepantasan serta standar kompetensi tertentu dari para calon kader.

### **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Unikom khususnya Divisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DP2M) yang memberikan bantuan selama persiapan, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat hingga penyusunan laporan.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, J. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta. Hlm. 19-20.
- Ibrahim, A. 2008. Legislasi dan Demokrasi. Malang: Trans Publishing.
- Gunawan, M. 2008. Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD). Jakarta: Trans Media Pustaka.
- Ni'matul Huda, 2014. Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.174-175.
- Purwantoro, Akbar, Wibowo. 2021. Penguatan Metode Pengajaran kepada Guru-Guru SMA/SMK Sederajat se-Kota Pekanbaru dalam rangka Mitigasi Bencana Pandemi Covid -19. *JUARA: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera*. 2(2): 161-177. Juli 2021. e-ISSN 2715-4998. DOI: 10.25105/juara.v2i2.9818.
- Soliha, R. 2016. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya. *Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2(2): 291-307. Oktober 2016. ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674.
- Ubaedillah, A & Abdul Rozak, 2003. Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Kencana, Jakarta, hlm. 106.